

Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Melalui Kewirausahaan Lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

***Liwaul¹**

¹²³Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari,
Indonesia

***Corresponding Author:** liwaul@uho.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran akses modal dan sumber daya manusia dalam menjaga eksistensi pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui kewirausahaan lokal serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam pada 10 pelaku usaha ikan asap di Kabupaten Buton Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses modal memainkan peran penting dalam mempertahankan eksistensi pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Pelaku kewirausahaan lokal masih mengalami akses yang belum memadai terhadap modal untuk dapat memulai dan mengembangkan usaha. Akses modal dapat diperoleh dari dukungan berbagai sumber, seperti SDM, pembiayaan mikro, lembaga keuangan inklusif, dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, adanya program pelatihan dan pendampingan juga membantu pelaku kewirausahaan dalam mengelola modal dengan efektif. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan akan membantu para pelaku kewirausahaan lokal dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi kerakyatan pada kewirausahaan lokal memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif memberikan peluang kerja, peningkatan pendapatan, dan perbaikan distribusi kekayaan. Masyarakat lokal juga dapat mendapatkan manfaat melalui adanya peningkatan akses terhadap produk dan layanan yang dihasilkan oleh kewirausahaan lokal.

Kata-kata kunci: Pertumbuhan ekonomi kerakyatan, kewirausahaan lokal, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract: *This study aims to examine the role of access to capital and human resources in maintaining the existence of people's economic growth through local entrepreneurship and its impact on improving community welfare. This qualitative research used a qualitative approach and data was collected through in-depth observations and interviews with 10 smoked fish business actors in North Buton Regency. The results show that access to capital plays an important role in maintaining the existence of people's economic growth. Local entrepreneurs still experience inadequate access to capital to be able to start and develop businesses. Access to capital can be obtained from the support of various sources, such as human resources, microfinance, inclusive financial institutions, and partnerships with related parties. In addition, the existence of training and mentoring programs also helps entrepreneurial actors in managing capital effectively. Improving the quality of human resources through education and training will help local entrepreneurs develop the necessary skills and knowledge. People's economic growth in local entrepreneurship has a significant impact on improving community welfare. Equitable and inclusive economic growth provides employment opportunities, increased income, and improved wealth distribution. Local communities can also benefit through increased access to products and services produced by local entrepreneurship.*

Keywords: *People's economic growth, local entrepreneurship, community welfare.*

1. Pendahuluan

Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat kegiatan ekonomi (Rudiansyah, 2021; Yuanitasari & Suparto, 2020). Prinsip utama dari ekonomi kerakyatan adalah pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi dan mempromosikan partisipasi aktif serta inklusif dari semua anggota masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Septyarini & Maharani, 2019; Styaningrum, 2021). Namun, dalam perjalanannya, ekonomi kerakyatan menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ekonomi kerakyatan muncul sebagai alternatif dari sistem ekonomi yang dominan, yang sering kali didasarkan pada kepentingan ekonomi yang sempit dan tidak merata. Ekonomi kerakyatan berfokus pada pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif, pembagian keuntungan yang adil, dan keberlanjutan ekonomi (Diatmika & Rahayu, 2022). Prinsip-prinsip utama ekonomi kerakyatan meliputi kepemilikan bersama, partisipasi demokratis, keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan lingkungan.

Salah satu tujuan utama ekonomi kerakyatan adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi, ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, pendapatan yang adil, serta akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan layanan ekonomi. Secara sosial, ekonomi kerakyatan berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup, kesetaraan, dan keadilan sosial (Pritandhari, 2022). Sementara itu, dalam aspek lingkungan, ekonomi kerakyatan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem (Supriatna, 2021). Pertumbuhan ekonomi kerakyatan adalah suatu proses yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sumber daya dan modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Fathy, 2019). Olehnya itu maka modal dan sumber daya memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah, koperasi, dan inisiatif ekonomi lokal lainnya. Betapa pentingnya modal dan sumber daya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Modal adalah salah satu faktor kunci dalam memulai dan mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan (Syadzali, 2020). Akses yang memadai ke modal, baik melalui pinjaman bank, modal ventura sosial, atau skema pembiayaan mikro, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk memulai atau memperluas usaha masyarakat. Modal yang cukup akan membantu dalam pengadaan aset, pembelian peralatan, pengembangan produk, dan ekspansi usaha. Sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil adalah aset berharga dalam pertumbuhan ekonomi kerakyatan (Wuli, 2023). Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha masyarakat. Sumber daya manusia yang terlatih dan terampil juga akan mendorong inovasi, produktivitas, dan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan.

Modal sosial, seperti kepercayaan, solidaritas, dan jaringan sosial, juga merupakan sumber daya yang penting dalam pertumbuhan ekonomi

kerakyatan (Fathy, 2019). Keberadaan modal sosial yang kuat akan memperkuat kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan saling mendukung antara pelaku ekonomi kerakyatan untuk memfasilitasi pertumbuhan usaha, memperluas akses ke sumber daya, dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Modal dan sumber daya memainkan peran krusial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan (Wujarso, 2022). Akses yang memadai ke modal dan sumber daya akan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha mereka. Investasi dalam modal dan sumber daya, baik dalam bentuk modal finansial, kapasitas dan keterampilan, sumber daya alam, teknologi, infrastruktur, sumber daya manusia, maupun modal sosial, akan memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan. Hal ini perlu adanya kebijakan yang mendukung dan akses yang inklusif agar masyarakat dapat memanfaatkan modal dan sumber daya dengan maksimal dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun memiliki tujuan yang mulia, ekonomi kerakyatan menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi pencapaian kesejahteraan Masyarakat yaitu; 1) Akses Terbatas ke Modal dan Sumber Daya. Salah satu hambatan utama dalam ekonomi kerakyatan adalah akses terbatas masyarakat terhadap modal dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Keterbatasan akses terhadap kredit, lahan, teknologi, dan infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat (Idayu et al., 2021). 2) Kurangnya Kapasitas dan Keterampilan. Terdapat anggota masyarakat dalam ekonomi kerakyatan memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha secara efektif 3). Kurangnya pendidikan dan pelatihan dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi. 4) Ketimpangan Ekonomi dan Sosial: Meskipun tujuan ekonomi kerakyatan adalah menciptakan kesejahteraan yang merata, ketimpangan ekonomi dan sosial masih sering terjadi. Faktor-faktor seperti kesenjangan pendapatan, kesenjangan akses terhadap sumber daya, dan diskriminasi dapat menyebabkan ketimpangan yang signifikan antara kelompok masyarakat. 5)

Rendahnya Akses ke Pasar. Akses yang terbatas ke pasar adalah permasalahan serius dalam ekonomi kerakyatan. Kurangnya akses ke pasar yang luas dan sulitnya memasuki pasar yang didominasi oleh perusahaan besar dapat menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah (Tambunan, 2021). 6) Tantangan Regulasi: Beberapa regulasi dan kebijakan pemerintah dapat menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Regulasi yang kompleks, birokrasi yang berlebihan, dan kurangnya perlindungan hukum dapat mempersulit kegiatan usaha masyarakat (Fachrodin, 2019).

Ekonomi kerakyatan dapat menjadi instrumen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan yang mempengaruhi pencapaian kesejahteraan terutama pengembangan potensi lokal dan kewirausahaan yang digeluti masyarakat. Olehnya itu maka penting bagi pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait untuk bekerja sama dalam implementasi solusi-solusi ini agar dapat mencapai hasil yang signifikan.

2. Metode Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi Obyek kajian yaitu di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara-Indonesia, dimana terdapat Masyarakat yang mengembangkan kewirausahaan lokal berupa usaha pengerikan ikan isap untuk menopang pendapatan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus yaitu pendekatan penelitian yang mendalam terhadap suatu fenomena tertentu dalam konteks yang nyata. Metode ini digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menggambarkan karakteristik dan kompleksitas suatu kasus dengan mendalam. Studi kasus sering kali dilakukan dalam lingkungan alami, seperti organisasi, komunitas, individu, atau peristiwa, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dengan melakukan wawancara mendalam para pelaku usaha ikan asap di Kabupaten Buton Utara.

Metode pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara Mendalam yaitu melakukan wawancara mendalam dengan pelaku usaha ikan asap yang dipilih secara purposive sampling. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka secara bebas. Adapun jumlah informan adalah para pelaku usaha ikan asap di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara sebanyak 10 orang. Observasi Partisipatif yaitu Peneliti melakukan observasi partisipatif di lokasi usaha ikan asap di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara yang dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses produksi, manajemen, dan interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.

Teknik analisis Data melalui:

- a) Transkripsi Wawancara. Wawancara akan direkam dan kemudian ditranskripsikan secara verbatim untuk memudahkan analisis data.
- b) Analisis Tematik. Data dari wawancara dan observasi akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data dan mengorganisasikannya menjadi kategori-kategori yang saling terkait.
- c) Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk memahami motivasi, tantangan, strategi, dan dampak usaha ikan asap. Kesimpulan akan diambil berdasarkan temuan yang muncul dari analisis data.

Validitas dan kepercayaan data melalui:

- a) Triangulasi. Untuk meningkatkan validitas, metode triangulasi akan digunakan. Data yang diperoleh dari wawancara akan dikonfirmasi dengan data dari observasi dan sumber lain yang relevan.
- b) Refleksivitas. Peneliti menerapkan refleksivitas dalam proses penelitian untuk mempertimbangkan pengaruh peneliti terhadap data dan analisis data yang telah dikumpulkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan adalah konsep yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Kewirausahaan lokal merupakan salah satu komponen penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi kerakyatan tersebut. Kewirausahaan lokal melibatkan usaha-usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat setempat dengan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di sektor perikanan dan kelautan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang digeluti oleh rumah tangga di Kabupaten Buton Utara sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Buton Utara, 2022

Kecamatan	Perikanan Laut	Persentase (%)
Bonegunu	461	13.87
Kambowa	315	9.48
Wakorumba Utara	347	10.44
Kulisusu	1229	36.98
Kulisusu Barat	300	9.03
Kulisusu Utara	671	20.19
Total	3.323	100

Sumber : BPPS, Buton Utara, 2022.

Produksi ikan asap merupakan salah satu sektor penting dalam industri perikanan di Indonesia, dilakukan melalui proses pengasapan untuk meningkatkan daya tahan dan memberikan rasa yang khas, proses pengasapan ini dilakukan dengan menggunakan kayu atau bahan bakar lainnya yang menghasilkan asap. Jumlah produksi usaha ikan asap dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.

Jumlah Produksi Ikan Asap pada 10 Informan di Kecamatan Kulisusu

Tahun	Rerata Produksi	Persentase (%)
2021	4.880	44.40
2022	6.110	55.60
Total	10.990	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2022.

1) Akses Modal dan Sumber Daya.

Akses modal dan sumber daya adalah faktor krusial dalam kewirausahaan masyarakat (Novitasari, 2023). Dalam konteks ini, akses modal mengacu pada kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha ikan asap. Disisi lain sumber daya, mencakup aset fisik, pengetahuan, jaringan, dan dukungan yang dapat mendukung keberhasilan kewirausahaan (Suardhika, 2021). Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam usaha ikan asap adalah rendahnya akses modal yang dapat menjadi hambatan dalam pengembangan dan pertumbuhan usaha. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya akses modal antara lain

a) Keterbatasan Keuangan Pribadi.

Banyak pelaku usaha ikan asap memiliki keterbatasan keuangan pribadi yang membuat mereka sulit untuk mengumpulkan modal yang cukup untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Keterbatasan ini dapat menghambat investasi dalam peralatan, infrastruktur, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.

b) Kurangnya Akses ke Lembaga Keuangan.

Bagi sebagian pelaku usaha ikan asap, akses ke lembaga keuangan seperti bank atau koperasi seringkali sulit. Kondisi ini dapat disebabkan oleh persyaratan yang ketat, kurangnya jaminan yang memadai, atau kurangnya pemahaman tentang prosedur dan persyaratan pembiayaan yang tersedia.

c) Risiko Usaha yang Tinggi.

Usaha ikan asap memiliki risiko yang tinggi terkait dengan fluktuasi harga bahan baku, biaya produksi, persaingan pasar, dan perubahan regulasi. Karena risiko ini, lembaga keuangan mungkin enggan memberikan pembiayaan yang cukup atau mengenakan suku bunga yang tinggi bagi pelaku usaha.

Solusi untuk Meningkatkan Akses Modal dalam Usaha Ikan Asap untuk mengatasi tantangan rendahnya akses modal sebagai berikut :

a) Dukungan Pembiayaan Mikro dan Mikro-Kredit

Pembiayaan mikro dan mikro-kredit merupakan bentuk pembiayaan dengan jumlah yang lebih kecil yang ditujukan untuk individu atau kelompok dengan akses terbatas ke modal (Mahadiansar et al., 2020). Program pembiayaan dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga keuangan, atau organisasi non-pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memulai atau mengembangkan usaha khususnya pelaku usaha ikan asap.

b) Dukungan koperasi dan Lembaga Keuangan Inklusif.

Koperasi dan lembaga keuangan inklusif dapat memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau ke modal bagi masyarakat (Marlina & Rahmat, 2018). Koperasi dapat membantu dalam mengumpulkan sumber daya bersama dan memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga keuangan inklusif, seperti bank perkreditan rakyat atau bank syariah, dapat menyediakan layanan perbankan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya pelaku usaha ikan asap.

c) Program Pelatihan dan Pendampingan.

Program pelatihan dan pendampingan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan

dalam menjalankan usaha (Marlina & Rahmat, 2018). Pelaku usaha Ikan asap membutuhkan adanya pelatihan dapat mencakup manajemen usaha, keuangan, pemasaran, dan keterampilan teknis yang relevan. Pendampingan oleh para ahli atau mentor juga dapat memberikan panduan dan dukungan dalam menghadapi tantangan kewirausahaan.

d) Akses ke Infrastruktur dan Teknologi

Akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan transportasi adalah penting dalam mendukung kewirausahaan masyarakat. Selain itu, akses ke teknologi informasi dan komunikasi juga dapat memberikan peluang dalam memperluas jangkauan pasar, memperoleh informasi bisnis yang relevan, dan meningkatkan efisiensi operasional (Nurchaya & Majapahit, 2018).

e) Jaringan dan Kemitraan.

Membangun jaringan dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait, seperti produsen, pemasok, distributor, dan lembaga pendidikan, dapat memberikan akses ke sumber daya yang berharga. Jaringan dan kemitraan ini dapat membantu dalam memperoleh bahan baku, memasarkan produk, dan mendapatkan dukungan teknis dan pengetahuan dari mitra yang lebih berpengalaman (Raharjo, 2018).

Salah satu permasalahan lain yang sering dihadapi dalam usaha ikan asap adalah rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menjadi hambatan dalam pengembangan dan pertumbuhan usaha yaitu :

a) Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan.

Banyak pelaku usaha ikan asap memiliki keterbatasan dalam hal keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola usaha dengan efektif. Kurangnya pendidikan, pelatihan, dan akses ke informasi yang tepat dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengelola aspek produksi, manajemen, pemasaran, dan keuangan (Paramita et al., 2018).

b) Kurangnya Akses Pendidikan dan Pelatihan

Pelaku usaha ikan asap terkadang menghadapi keterbatasan akses ke program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan usaha mereka. Kurikulum yang tidak sesuai, biaya yang tinggi, atau keterbatasan infrastruktur pendidikan dan pelatihan dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku usaha (Desmaryani, 2018).

c) Kurangnya Kesadaran akan Inovasi dan Teknologi

Perkembangan teknologi dan inovasi dalam usaha ikan asap terus berlanjut. Namun, rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang inovasi dan teknologi baru dapat menghambat pelaku usaha dalam mengadopsi praktik terbaik dan meningkatkan efisiensi produksi serta kualitas produk (Bismala et al., 2018).

d) Kurangnya Pengembangan Kewirausahaan

Kemampuan untuk mengembangkan ide kreatif, mengidentifikasi peluang pasar, dan mengelola risiko adalah faktor penting dalam usaha ikan asap yang sukses. Namun, rendahnya pengembangan kewirausahaan dan keterampilan manajerial dapat menjadi hambatan dalam menghadapi persaingan dan mengoptimalkan potensi usaha.

Upaya atau solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia para pelaku usaha ikan asap:

a) Program Pendidikan dan Pelatihan yang Tepat

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi terkait dapat menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha ikan asap. Program ini dapat meliputi pelatihan keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan, serta pendidikan tentang praktik terbaik dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran ikan asap.

b) Kemudahan Akses Informasi

Pemerintah dan organisasi terkait dapat memfasilitasi akses yang mudah ke informasi tentang inovasi, teknologi terbaru, dan praktik terbaik dalam usaha ikan asap. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan platform

online, seminar, lokakarya, atau pertemuan komunitas yang mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar pelaku usaha.

c) Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Penelitian

Pelaku usaha ikan asap dapat menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk mendapatkan akses ke pengetahuan dan sumber daya yang relevan. Kemitraan ini dapat melibatkan pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan pengembangan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan usaha ikan asap.

d) Pendekatan Pembelajaran Kolaboratif

Pelaku usaha ikan asap dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui pendekatan pembelajaran kolaboratif. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok diskusi, komunitas belajar, atau jaringan bisnis yang memungkinkan pelaku usaha untuk saling mendukung dan bertukar informasi tentang praktik terbaik.

e) Pendampingan dan Mentorship

Program pendampingan dan mentorship dapat membantu pelaku usaha ikan asap dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kewirausahaan mereka. Pendamping atau mentor yang berpengalaman dapat memberikan bimbingan, saran, dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan potensi usaha.

f) Peningkatan Literasi Digital

Dalam era digital, literasi digital menjadi penting dalam mengelola usaha. Pelaku usaha ikan asap dapat meningkatkan literasi digital mereka melalui pelatihan dan pendampingan khusus, yang mencakup penggunaan platform online, pemasaran digital, manajemen inventaris, dan pemantauan performa usaha.

Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dapat menjadi hambatan dalam pengembangan dan pertumbuhan usaha ikan asap. Namun, dengan solusi yang tepat, seperti program pendidikan dan pelatihan yang tepat, akses yang mudah ke informasi, kemitraan dengan lembaga pendidikan dan

penelitian, pendekatan pembelajaran kolaboratif, pendampingan dan mentorship, serta peningkatan literasi digital, SDM dalam usaha ikan asap dapat ditingkatkan. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi terkait, dan pelaku usaha dapat bekerja sama untuk menerapkan solusi-solusi ini dan mendukung pertumbuhan ekonomi ikan asap secara berkelanjutan. Rendahnya kapasitas dan keterampilan dalam kegiatan kewirausahaan dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Hanis & Marzaman, 2020). Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan para pelaku usaha seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan usaha. Kurangnya akses ke program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dapat menghambat pengembangan kapasitas dan keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan, produksi, pemasaran, dan manajemen usaha (Aziz et al., 2023). Kurangnya kesadaran akan praktik terbaik dalam pengolahan, pengawetan, dan pemasaran ikan asap terus berkembang. Namun, rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang praktik terbaik ini dapat menghambat pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan daya saing di pasar (Munizu et al., 2023). Kemampuan manajerial dan kewirausahaan yang kuat adalah faktor penting dalam mengelola dan mengembangkan usaha lokal (Khamimah, 2021). Namun, rendahnya keterampilan dalam manajemen operasional, manajemen keuangan, pemasaran, dan inovasi dapat menghambat pertumbuhan usaha dan memanfaatkan peluang pasar yang ada. Rendahnya kapasitas dan keterampilan dalam usaha ikan asap dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan solusi yang tepat, seperti program pendidikan dan pelatihan yang relevan, akses yang mudah ke informasi, kemitraan dengan lembaga pendidikan dan penelitian, pendekatan pembelajaran kolaboratif, pendampingan dan mentorship, serta peningkatan literasi digital, kapasitas dan keterampilan dalam usaha ikan asap dapat ditingkatkan. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi terkait, dan pelaku usaha dapat bekerja sama untuk menerapkan solusi-solusi ini dan mendukung

pertumbuhan ekonomi ikan asap serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya tersebut dapat meningkatkan pemerataan ekonomi dan sosial sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan kesempatan di antara individu, kelompok, dan wilayah. Tujuan utama dari pemerataan ekonomi dan sosial adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemerataan ekonomi dan sosial (Suman et al., 2019). Pemerataan ekonomi dan sosial memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pengembangan diri (Nst, 2020). Upaya ini melibatkan kebijakan dan program yang memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial-ekonomi.

Pemerataan ekonomi melibatkan pembagian pendapatan dan kekayaan yang lebih merata di antara individu dan kelompok dalam masyarakat (Amin, 2023). Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan pajak yang progresif, perlindungan sosial yang memadai, dan pengurangan kesenjangan upah. Pemerataan juga melibatkan pengurangan kesenjangan dalam kepemilikan aset dan akses terhadap sumber daya produktif seperti lahan, modal, dan teknologi (Tamboto & Manongko, 2019). Pemerataan ekonomi dan sosial berarti mengurangi jumlah dan tingkat kemiskinan di masyarakat. Ini melibatkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada dalam kondisi paling rentan. Upaya ini termasuk pembangunan infrastruktur dasar, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta program bantuan sosial yang tepat sasaran. Pemerataan ekonomi dan sosial melibatkan pengembangan wilayah yang merata untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Hasid et al., 2022). Upaya ini melibatkan investasi dalam infrastruktur, akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta menciptakan peluang ekonomi di wilayah yang

terpinggirkan. Peningkatan kualitas hidup dan akses terhadap pekerjaan yang layak di seluruh wilayah akan membantu mengurangi disparitas regional.

Pemerataan ekonomi dan sosial membutuhkan investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan dengan melibatkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang setara bagi semua individu, termasuk pendidikan formal dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja (Lasaiba, 2023). Pendidikan yang berkualitas dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam kesempatan dan membuka pintu bagi mobilitas sosial (Sembiring & Alfarizi, 2023). Pemerataan ekonomi dan sosial membutuhkan partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat (Hamid, 2018). Ini melibatkan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, membangun kapasitas lokal, dan memperkuat organisasi masyarakat sipil. Partisipasi yang inklusif dan pemberdayaan masyarakat akan membantu memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerataan ekonomi dan sosial adalah proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu. Kolaborasi dan kerjasama antara berbagai pihak diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan melaksanakan program yang berkelanjutan guna mencapai pemerataan ekonomi dan sosial yang lebih baik dalam masyarakat.

Keterbatasan dalam generalisasi temuan karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sampel yang terbatas. Tidak melibatkan analisis data kuantitatif, sehingga tidak dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang ukuran dan skala usaha ikan asap di Kabupaten Buton Utara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pelaku usaha ikan asap dari perspektif pelaku usaha. Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan usaha ikan asap dan kebijakan terkait.

4. Kesimpulan

Ekonomi kerakyatan memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun, permasalahan seperti akses terbatas ke modal dan sumber daya, kurangnya kapasitas dan keterampilan, ketimpangan ekonomi dan sosial, rendahnya akses ke pasar, tantangan regulasi, ketidakpastian ekonomi dan politis, dan kurangnya akses ke layanan publik seringkali menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan yang mendukung, meningkatkan akses terhadap modal dan sumber daya, meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat, serta mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, ekonomi kerakyatan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat jika permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi secara efektif. Tersedianya akses ke pasar yang baik sangat penting dalam usaha ikan asap. Dengan solusi seperti pengembangan infrastruktur, kemitraan dengan pihak-pihak terkait, peningkatan kualitas dan sertifikasi, peningkatan pengetahuan pasar, pemanfaatan teknologi, dan dukungan pemerintah yang mendukung, pelaku usaha ikan asap dapat meningkatkan akses mereka ke pasar yang lebih luas. Peningkatan akses ke pasar akan membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas peluang bisnis dalam usaha ikan asap.

Daftar Pustaka

- Amin, D. (2023). Pemerataan Dan Keadilan Ekonomi Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Syariah). *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(01).
- Aziz, S. A., Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2023). Pengembangan Usaha dari Sumber Daya Lokal Sektor Pertanian: Kasus Pada Produk Kopi

Tersertifikasi Indikasi Geografis (IG). *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, 5, 164–170.

Bismala, L., Handayani, S., & Andriany, D. (2018). *Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.

Desmaryani, S. (2018). *Wirausaha dan Daya Saing*. Deepublish.

Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.

Fachrodin, F. (2019). Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7(1), 114–138.

Fathy, R. (2019). Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17.

Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat*. De la macca.

Hanis, N. W., & Marzaman, A. (2020). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 123–135.

Hasid, H. Z., SE, S. U., Akhmad Noor, S. E., SE, M., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.

Idayu, R., Husni, M., & Suhandi, S. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 73–85.

Khamimah, W. (2021). Peran kewirausahaan dalam memajukan perekonomian Indonesia. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(3), 228–240.

Lasaiba, M. A. (2023). Pengembangan Wilayah Tertinggal Di Indonesia: Optimalisasi Sumber Daya Alam Dan Teknologi Untuk Kemajuan Yang Berkelanjutan. *Jendela Pengetahuan*, 16(1), 13–23.

- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92.
- Marlina, L., & Rahmat, B. Z. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 125–135.
- Munizu, M., Tandiono, R., Pravitasari, E., Kardini, N. L., Hendrawan, H., Nur, T., Siswanto, A., & Manuaba, I. B. K. (2023). *UMKM: Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Novitasari, A. T. (2023). Peran Modal Usaha Terhadap Minat Berwirausaha Batik Tulis Tanjung Bumi. *Journal on Education*, 6(1), 2295–2302.
- Nst, M. (2020). *Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Dalam Menentukan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan*.
- Nurchahya, H., & Majapahit, S. A. (2018). Kajian Penerapan Teknologi Informasi Pada UMKM Sebagai Upaya Memperluas Pasar Produk Lokal. *Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) 2018*.
- Paramita, M., Muhlisin, S., & Palawa, I. (2018). Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19–30.
- Pritandhari, M. (2022). Peran UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. *Eksistensi Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia*, 1, 61.
- Raharjo, T. W. (2018). *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan Usaha UMKM, Koperasi dan Korporasi*. Jakad Media Publishing.
- Rudiansyah, R. (2021). *Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. IAIN Parepare.

- Sembiring, E. S. K., & Alfarizi, A. W. (2023). Strategi Efektif dalam Manajemen Kemiskinan (Pendekatan Terpadu untuk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi). *World Management*, 1(02), 37–47.
- Septyarini, E., & Maharani, B. D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Peran Credit Union. *Manajemen Dewantara*, 3(2), 250–261.
- Styaningrum, F. (2021). Konsep sistem ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(8), 656–663.
- Suardhika, I. N. (2021). *Model Strategi Bersaing Berbasis Sumberdaya Bagi Usaha Kecil Dan Menengah*. CV. Azka Pustaka.
- Suman, A., Putra, R. E. N., Amalia, S. K., Hardanto, H., Kusuma, C. A., & Amir, F. (2019). *Ekonomi lokal: pemberdayaan dan kolaborasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syadzali, M. M. (2020). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi pada UKM Pembuat Kopi Muria). *Syntax*, 2(5).
- Tamboto, H. J. D., & Manongko, A. A. C. (2019). *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial*. Makaria Waya.
- Tambunan, T. T. H. (2021). *UMKM di Indonesia: perkembangan, kendala, dan tantangan*. Prenada Media.
- Wujarso, R. (2022). Peran human capital dalam pertumbuhan ekonomi. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 6(2), 430–438.
- Wuli, R. N. (2023). Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian Untuk Menciptakan Petani Unggul Demi Mencapai Ketahanan Pangan. *Jurnal Pertanian Unggul*, 2(1), 1–15.

Yuanitasari, D., & Suparto, S. (2020). Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 36–51.